BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh PAD dan *Unconditional Grants* terhadap kemandirian daerah tahun 2012 – 2019 di Provinsi Jawa Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Artinya semakin tinggi nilai PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Variabel *Unconditional Grants* (UG) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Artinya semakin tinggi nilai UG maka semakin rendah tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Variabel PAD dan UG secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. *Flypaper effect* terjadi di Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. sukabumi, Kota sukabumi dan Kab. Cianjur, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Indramayu dan Kota Banjar dan tidak terjadi di Kab. Bekasi dan Kota Bekasi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa implikasi yang perlu diperhatikan yaitu :

5.2.1 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah terhadap kemandirian daerah. Dalam teori Hershey dan Blanchard, dikatakan bahwa ada empat pola kemandirian yang ditentukan oleh PAD dan transfer dimana kemandirian tinggi didapatkan ketika PAD daerah tersebut lebih tinggi dibanding transfer dan sebaliknya. Menurut Baldric, tingginya PAD menggambarkan sebesar apa

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Maka, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam menciptakan kemandirian keuangan pada daerahnya.

Unconditional grants berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Dalam teori Hershey dan Blanchard, tingginya transfer menandakan bahwa daerah tersebut tidak mandiri. Menurut Tresch, transfer tanpa syarat seringkali dianggap sebagai peningkatan penerimaan oleh pemerintah daerah, sehingga penggunaan transfer tanpa syarat ini dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen dimana pemerintah daerah sebagai konsumen akan memilih dan menggunakan dana transfer untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Model Birokratik Niskanen menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi karena sifat memaksimalkan anggaran para birokrat, melihat pola kecenderungan regional (ada dua kabupaten/kota yang tidak mengalami *flypaper effect*) dalam terjadinya *flypaper effect*, model ini paling cocok untuk menjelaskan penyebabnya. Semakin bergantung daerah terhadap transfer, semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut mengalami *flypaper effect.*

5.2.2 Implikasi Praktis

Kontribusi PAD dan *Unconditional Grants* memberikan implikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan PAD sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga tidak terjadi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat (*flypaper effect*). Dengan ini masyarakat diharapkan untuk tertib membayar pajak. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan pajak mengingat penerimaan pajak adalah sumber PAD terbesar khususnya di daerah minim sumber daya alam dan memaksimalkan potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Meningkatnya kemandirian setiap daerah pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan Indonesia secara keseluruhan karena meningkatnya kemandirian daerah menandakan berkurangnya beban anggaran pusat untuk mendanai daerah sehingga pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana transfer untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

5.3 Rekomendasi

1. Bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pengunaan alokasi dana transfer tanpa syarat sehingga penggunaan transfer dapat sesuai dengan tujuan awalnya yaitu meningkatkan pembangunan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Selain itu, diperlukan inovasi untuk memaksimalkan penerimaan dari potensi daerah sehingga dapat memenuhi target realisasi PAD serta meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pajak juga dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pajak daerah, sehingga biaya pemungutan pajak dapat berkurang dengan terfokusnya pemungutan pada pajak-pajak produktif.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas populasi dengan menambahkan provinsi lain, perbandingan kinerja sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal, atau memperinci hasil penelitian dengan mengelompokkan sektor potensi daerah sehingga didapatkan hasil yang lebih kaya. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan PAD dan transfer tanpa syarat (DAU+DBH) sehingga disarankan juga untuk menambah variabel-variabel yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kemandirian daerah seperti populasi dan DAK.